

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia dikenal sebagai negara yang masyarakatnya majemuk. Hal ini tercermin dalam semboyan “Bhineka Tunggal Ika” yang artinya meskipun berbeda-beda namun tetap satu juga. Kemajemukan masyarakat Indonesia terdiri atas keragaman suku bangsa, agama, dan bahasa yang berbeda-beda. Keragaman ini pula yang memunculkan adanya pluralisme atau berlaku lebih dari satu sistem hukum di Indonesia, salah satunya di dalam bidang hukum perkawinan.

Di Indonesia, berlaku 3 (tiga) sistem hukum perkawinan yakni hukum perkawinan menurut hukum perdata Barat (BW) yang diberlakukan bagi WNI keturunan asing atau yang beragama kristen, hukum perkawinan menurut hukum islam yang diberlakukan bagi WNI keturunan atau pribumi yang beragama islam, dan hukum perkawinan menurut hukum adat yang diperuntukkan bagi masyarakat pribumi yang masih memegang teguh aturan hukum adat.¹

Meskipun semenjak tahun 1974, tepatnya setelah dikeluarkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) yang telah membuat unifikasi hukum di bidang hukum perkawinan, namun

¹ M.Bakri,dkk, **Pengantar Hukum Indonesia Pembidangan dan Asas-asas Hukum Jilid 2**, UB Press, Malang, 2013, hlm 19.

ternyata ada beberapa kelompok masyarakat yang tidak setuju dan belum siap untuk mengimplementasikan legal substansif dari UU Perkawinan tersebut.² Implikasi dari hal tersebut maka terjadilah rangkap hukum perkawinan yang dipraktikkan oleh masyarakat Indonesia. Diantaranya hukum adat, hukum islam, dan hukum negara. Hukum negara disini diartikan sebagai peraturan perundang-undangan yang telah disahkan oleh negara Indonesia.³

Sebagaimana telah disebutkan di atas, bahwa salah satu dari sistem hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia adalah hukum adat. Istilah hukum adat sendiri merupakan terjemahan dari adat recht yang diperkenalkan oleh Snouck Hurgronje dalam bukunya yang berjudul “*De Atjehers*” (orang-orang Aceh) pada tahun 1893.⁴ Para ahli telah memberikan definisinya terhadap hukum adat, salah satunya adalah Ter Haar. Menurut Ter Haar hukum adat adalah keseluruhan peraturan yang menjelma dalam keputusan-keputusan dari kepala-kepala adat dan berlaku secara spontan dalam masyarakat.

Terhaar terkenal dengan teori “keputusan” artinya bahwa untuk melihat apakah sesuatu adat-istiadat itu sudah merupakan hukum adat, maka perlu melihat dari sikap penguasa masyarakat hukum terhadap si pelanggar peraturan adat-istiadat. Apabila penguasa menjatuhkan putusan hukuman terhadap si pelanggar maka adat-istiadat itu sudah merupakan hukum adat.⁵ Selain itu, menurut Prof Koesnoe, terdapat 3 ciri hukum adat yaitu:

² Murdan, **Pluralisme Hukum (Adat dan Islam) di Indonesia**, Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam, Volume 1, Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2016, hlm 57.

³ Ibid

⁴ Imam Sudiyat, **Asas-asas Hukum Adat Bekal Pengantar**, Liberty, Yogyakarta, 1981, hlm 1.

⁵ <http://digilib.unila.ac.id/11242/3/Bab%202.pdf>. Diakses pada 11 Desember 2017 pukul 17.00 WIB

1. Bersifat tradisional

Artinya, ketentuan hukum adat tersebut erat kaitannya dengan masa lalu namun tetap dipertahankan dan diteruskan dari masa ke masa.

2. Bersifat suka pamor yang keramat

Artinya, aturan-aturan dalam hukum adat dipandang sebagai sesuatu yang sakral dan harus dihormati oleh masyarakat, serta terhadap pelanggarnya diberikan sanksi.

3. Bersifat luwes dan dinamis

Artinya hukum adat tidak statis, mengikuti perkembangan zaman, dan hanya memuat asas-asasnya saja.

Perkawinan berasal dari kata kawin yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai membentuk keluarga dengan lawan jenis; bersuami atau beristeri. Beberapa ahli telah memberikan definisinya terhadap perkawinan, salah satunya Prof. Mr. Paul Scholten. Menurutnya, perkawinan merupakan suatu hubungan hukum diantara seorang wanita dengan seorang pria untuk hidup bersama dengan kekal yang diakui oleh negara.⁶ Sedangkan, dalam UU Perkawinan definisi perkawinan diatur dalam Pasal 1 yang berbunyi:⁷

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

⁶ R.Soetojo Prawirohaidjojo dan Asis Safioedin, **Hukum Orang dan Hukum Keluarga**, Alumni, Bandung, 1985, hlm 3.

⁷ Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), definisi perkawinan diatur dalam Pasal 2 yang berbunyi:⁸

“Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqon gholiidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.

Perkawinan di dalam hukum adat didefinisikan bukan hanya sebagai ikatan perdata saja, tapi juga sebagai perikatan adat dan sekaligus pula merupakan perikatan kekeluargaan dan ketetanggaan. Jadi suatu ikatan perkawinan bukan hanya menyangkut masalah hubungan keluarga antara suami dan isteri saja, tetapi juga menyangkut hubungan kekerabatan antara kedua keluarga baik dari pihak suami maupun pihak isteri, kekeluargaan, kekerabatan dan ketetanggaan serta adat istiadat atau angger-angger dimana mereka tinggal.⁹

Dari definisi perkawinan di atas, dapatlah ditarik kesimpulan bahwa baik di dalam hukum nasional, hukum adat, maupun di dalam hukum agama manapun menghendaki agar suatu ikatan perkawinan itu dapat bersifat kekal. Artinya, sebisa mungkin ikatan perkawinan dapat dipertahankan jangan sampai terjadi perceraian. Meskipun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa pada kenyataannya tidak semua pasangan suami isteri dapat mempertahankan ikatan rumah tangga yang dibinanya. Ketika timbul permasalahan, tidak sedikit dari mereka yang memilih perceraian sebagai suatu jalan untuk memutus ikatan perkawinannya.

⁸ Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam

⁹ Jazim Hamidi dan Dani Harianto, **Hukum Perkawinan Campuran (Eksogami) Ala Masyarakat Hukum Adat Tengger**, UB Press, Malang, 2014, hlm 33.

Perceraian di dalam UU Perkawinan merupakan hal yang diperbolehkan ketika memang terjadi alasan-alasan yang kuat untuk melakukan perceraian. Demikian pula pada hukum Islam, meskipun sangat dibenci oleh Allah SWT, namun perceraian merupakan hal yang diperbolehkan. Akan tetapi, tidak demikian halnya pada hukum adat. Tidak semua hukum adat memperbolehkan masyarakatnya untuk melakukan perceraian, contohnya pada masyarakat hukum adat Baduy yang dikenal dengan istilah “Perkawinan Kebal Cerai”.

Perkawinan kebal cerai merupakan sebuah aturan yang terdapat di Baduy yang melarang masyarakatnya untuk melakukan perceraian. Ikatan perkawinan mereka hanyalah dapat diputus dengan adanya kematian. Pada dasarnya, aturan kebal cerai tersebut berlaku bagi seluruh masyarakat hukum adat Baduy baik Baduy Dalam (*Baduy Tangtu*) maupun Baduy Luar (*Baduy Panamping*). Kendati demikian, ternyata ada beberapa pasangan yang berasal dari Baduy yang memaksakan untuk memutus ikatan perkawinannya dengan jalan perceraian dan tidak dikenakan sanksi.

Padahal salah satu ciri dari hukum adat adalah adanya akibat hukum berupa sanksi bagi yang melanggar aturan-aturan di dalam hukum adatnya. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat hambatan dalam pelaksanaan aturan kebal cerai sehingga aturan tersebut tidak dapat berjalan secara optimal oleh karenanya pelaku perceraian tidak dikenakan sanksi sebagaimana mestinya. Berdasarkan data yang Penulis peroleh pada saat melakukan pra survey penelitian, ditemukan bahwa dalam 5 (lima) tahun terakhir kurang lebih telah

terjadi dua hingga 3 kasus perceraian dalam setiap tahunnya, atau kurang lebih sekitar 20% kasus perceraian terjadi di Baduy dalam 5 tahun terakhir.¹⁰

Keberadaan masyarakat Baduy sendiri sebagai salah satu kesatuan masyarakat hukum adat diakui keberadaannya oleh Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi:¹¹

- “(1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.
- (2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.

Prinsip mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisional telah ditegaskan dalam Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945, yang kemudian Bagir Manan menjabarkan sebagai berikut:

“Masyarakat hukum adat adalah masyarakat hukum (*rechtsgemeenschap*) yang berdasarkan hukum adat atau adat istiadat seperti desa, marga, nagari dan lain-lain. Masyarakat hukum adat adalah kesatuan masyarakat-bersifat teritorial atau genealogis yang memiliki kekayaan sendiri, memiliki warga yang dapat dibedakan dengan warga masyarakat hukum lain dan dapat bertindak ke dalam atau keluar sebagai satu kesatuan hukum (subjek hukum) yang mandiri dan memerintah diri mereka sendiri. Kesatuan masyarakat hukum adat ini tidak hanya diakui tetapi dihormati, artinya mempunyai hak hidup yang sederajat dan sama pentingnya dengan kesatuan pemerintahan yang lain seperti kabupaten dan kota. Kesederajatan ini mengandung makna bahwa kesatuan masyarakat hukum yang berdasarkan hukum adat berhak atas segala perlakuan dan diberi kesempatan berkembang sebagai subsistem Negara Kesatuan RI yang maju sejahtera dan modern. Hal ini merupakan

¹⁰ Wawancara Jaro Dainah (mantan Kepala Desa Kanekes). Menurut Beliau, perceraian biasanya hanya dilakukan secara adat jadi sedikit sulit untuk menentukan jumlah pasti perceraian dalam setiap tahunnya. Namun dalam 5 tahun terakhir ini, kurang lebih telah terjadi 20% kasus perceraian di Baduy Luar. Sedangkan untuk Baduy Dalam belum ada satupun yang melakukan perceraian.

¹¹ Pasal 18B undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

esensi yang membedakan dengan pengakuan kolonial terhadap masyarakat hukum adat”.¹²

Berdasarkan permasalahan di atas, Penulis terinspirasi untuk membahasnya dalam skripsi yang berjudul: PELAKSANAAN ATURAN KEBAL CERAI PADA PERKAWINAN MASYARAKAT HUKUM ADAT BADUY (Studi di Suku Baduy, Kecamatan Leuwidamar, Provinsi Banten). Ruang lingkup masalah yang akan diteliti oleh Penulis adalah pelaksanaan aturan kebal cerai, hambatan dalam pelaksanaan aturan tersebut sehingga yang melanggar tidak dikenakan sanksi, dan juga upaya untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan aturan kebal cerai pada perkawinan masyarakat hukum adat Baduy. Sebelumnya telah diangkat penelitian yang menjadikan hukum perkawinan Baduy sebagai objek penelitian sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 1. Tabel Orisinalitas Penelitian

No	Tahun Penelitian	Nama Peneliti dan Asal Instansi	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Keterangan
1	2016	Ayi Rukmana, Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta	Tradisi Perkawinan Baduy Luar dengan Baduy Dalam (Studi Kasus Desa Kanekes Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak Banten)	1. Bagaimana tradisi perkawinan Baduy Luar dan tradisi perkawinan Baduy Dalam? 2. Bagaimana interaksi islam, adat dan hukum dalam masyarakat Sunda Wiwitan serta penerimaan hukum Islam?	Perbedaannya dengan yang akan penulis teliti adalah jika pada penelitian sebelumnya lebih membahas mengenai tradisi perkawinan antara Baduy Luar dengan Baduy Dalam, sedangkan dalam penelitian yang akan penulis bahas adalah tentang pelaksanaan aturan kebal cerai pada masyarakat Baduy baik Baduy Dalam maupun Baduy Luar.

¹² Husen Alting, **Dinamika Hukum Dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah**, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2010, hlm 37.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan judul dan latar belakang di atas, penulis merumuskan permasalahan terkait dengan pelaksanaan aturan kebal cerai pada perkawinan masyarakat hukum adat Baduy sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan aturan kebal cerai pada perkawinan masyarakat hukum adat Baduy?
2. Bagaimana hambatan dalam pelaksanaan aturan kebal cerai pada perkawinan masyarakat hukum adat Baduy?
3. Bagaimana upaya untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan aturan kebal cerai pada perkawinan masyarakat hukum adat Baduy?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengidentifikasi, mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan aturan kebal cerai pada perkawinan masyarakat hukum adat Baduy
2. Untuk mengidentifikasi, mendeskripsikan dan menganalisis hambatan dalam pelaksanaan aturan kebal cerai pada perkawinan masyarakat hukum adat Baduy.
3. Untuk mengidentifikasi, mendeskripsikan dan menganalisis upaya untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan aturan kebal cerai pada perkawinan masyarakat hukum adat Baduy.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritik

Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangsih dalam usaha pembaharuan bidang pengkajian ilmu hukum dan memperkuat eksistensi

ilmu hukum perdata khususnya bidang hukum perkawinan adat terkait dengan pelaksanaan aturan kebal cerai pada perkawinan masyarakat hukum adat Baduy.

2. Manfaat Aplikatif

1. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan bagi pemerintah untuk memberikan perhatian lebih kepada masyarakat hukum adat Baduy terkait dengan bidang perkawinan terutama mengenai pelaksanaan aturan kebal cerai pada perkawinan masyarakat hukum adat Baduy.

2. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan mampu membekali, memberi informasi dan menambah khazanah ilmu pengetahuan bagi masyarakat tentang tradisi dan aturan apa saja yang diterapkan pada perkawinan masyarakat adat Baduy, terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan aturan kebal cerai pada perkawinan masyarakat hukum adat Baduy.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang penulis memilih pelaksanaan aturan kebal cerai pada perkawinan masyarakat hukum adat Baduy sebagai judul skripsi, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian yang terbagi menjadi manfaat teoritis dan manfaat aplikatif.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan lebih dalam mengenai teori-teori yang melandasi penulisan dan pembahasan yang berkaitan dengan judul untuk dijadikan sebagai pisau analisis dalam proses penelitian ini. Teori-teori tersebut akan diperoleh melalui studi kepustakaan.

BAB III : METODE PENELITIAN

Terdiri dari uraian tentang jenis penelitian yang digunakan, pendekatan penelitian, alasan pemilihan lokasi, jenis data, teknik pengambilan data, populasi dan sampling, definisi operasional serta sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Terdiri dari uraian tentang jawaban dari apa yang sebelumnya telah dirumuskan dalam rumusan masalah dengan berpedoman pada metode penelitian yang digunakan, kemudian dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan serta konsep yang terkait dengan judul penelitian ini.

BAB V : PENUTUP

Bab ini terdiri dari uraian singkat kesimpulan yang didapat oleh penulis dari uraian yang telah ada pada bab-bab sebelumnya. Selanjutnya memberikan saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang ada kaitannya dengan penelitian ini.